



DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD)  
JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN DAN **PEMBANGUNAN** (JPKP)  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR AHU-0001682.AH.01.07-TAHUN 2015  
SK. DPD NO : 0691/SK/DPP-JPKP/VII/2020

Sekertariat : Jl. Raya Tanagura Barat Desa Tangura Barat Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan  
Email : [jpkpdpdbangkalan@gmail.com](mailto:jpkpdpdbangkalan@gmail.com) Telp. 082143551771 Kode Pos 69154

Nomor : 0018/DPD-BKL/JPKP/X/2025  
Lampiran : 1 Bandel  
Perihal : **Permohonan Percepatan Proses Sertifikasi Lahan Pengungsi Sambas Kabupaten Bangkalan - Jawa Timur**

**KEPADA YTH :**

**WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**BAPAK GIBRAN RABUMING RAKA**

**DI**

**JAKARTA**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam Pengabdian Tanpa Syarat**

**JPKP Siap Melayani**

Dengan diawali rasa syukur kepada Tuhan YME, serta teriring doa semoga kesehatan selalu terlimpahkan kepada Bapak Gibran Rakbuming Raka dalam melaksanakan tugas tugas Negara sebagai wakil Presiden. Besar harapan kami relawan JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) untuk Bapak Gibran senantiasa diberikan kelancaran dalam mengemban amanat sebagian besar rakyat Indonesia.

Bersama dengan ini perlu sekiranya kami relawan JPKP DPD Bangkalan Jawa Timur menyampaikan kepada Bapak Gibran terkait giat JPKP DPD Bangkalan dalam membawa aspirasi masyarakat Eks. pengungsi Sambas yang terletak di Dusun Longkak Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Giat tersebut meliputi :

1. Penyampaian pengaduan warga Eks. Pengungsi Sambas (Bangkalan Jatim) terkait permohonan kepada pemerintah pusat atas lahan perhutani yang ditempati para pengungsi Sambas sejak tahun 2000 silam dalam bentuk proposal kepada Presiden Republik Indonesia ke 7 Bapak Ir. Joko Widodo dengan **Nomor Surat : 0001/DPAC-SPL/JPKP/XII/2021**, dan masing masing tembusan kepada :
  - a. Menteri Dalam Negeri
  - b. Menteri ATR BPN
  - c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - e. Gubernur Jawa Timur
  - f. Bupati Bangkalan

**Arsip terlampir periode Desember Tahun 2021 Dokumen 1**

2. Menyerahkan proposal kepada Presiden Ir. Joko Widodo pada kunjungan beliau diwaktu meresmikan Bandar Udara Trunojoyo Sumenep Madura

**Arsip terlampir periode 09 Desember 2022 Dokumen 2**

3. Follow up surat surat terkirim ke masing kementerian yang dilakukan oleh DPP JPKP
4. Follow up perkembangan surat menyurat kepada dua (2) kementerian terkait (Kementerian LHK dan Kementerian ATR BPN) yang dilakukan oleh JPKP DPD Bangkalan, perwakilan pengungsi Sambas dengan didampingi Wasekjen DPP JPKP guna bisanya pengajuan terkait diprioritaskan masuk program PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan).

**Arsip terlampir periode Tahun 2022 Dokumen 4**

5. Penyerahan berkas lengkap kepada PUPR Kabupaten Bangkalan atas perintah Kementerian LHK melalui DPP JPKP (Bapak Maret Samuel Sueken)

**Arsip terlampir periode Tanggal 08 Agustus 2023 Dokumen 5**

6. Pendampingan kepada pengungsi Sambas atas kunjungan petugas Kantah BPN Propinsi Jatim.

**Arsip terlampir periode Tanggal 26 September 2023 Dokumen 6**

7. Pendampingan kepada pengungsi Sambas atas kunjungan petugas dari Kementerian LHK (Timdu)

**Arsip terlampir periode Tanggal 02 November 2023 Dokumen 7**

8. Pendampingan kepada pengungsi Sambas atas kunjungan petugas dari Kantah BPN Propinsi Jatim dan Kabupaten Bangkalan

**Arsip terlampir periode Tahun 2024 Dokumen 8**

9. Penyerahan berkas kepada Bupati Bangkalan terpilih

**Arsip terlampir periode Tanggal 07 Mei 2025 Dokumen 9**

10. Kunjungan JPKP DPD Bangkalan bersama perwakilan pengungsi Sambas kepada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan menerima kabar terbitnya Kepmen Lingkungan Hidup **Nomor 287 Tahun 2025** tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan

**Arsip terlampir periode Tanggal 27 Agustus 2025 Dokumen 10**

11. Pendampingan kepada pengungsi Sambas atas kunjungan petugas dari Kantah Kanwil Jatim dan Kabupaten Bangkalan terkait proses lanjutan dari terbitnya Kepmen 287 Tahun 2025

**Arsip terlampir periode Tanggal 10 September 2025 Dokumen 11**

Atas perkembangan terakhir dari pendampingan kami relawan JPKP DPD Bangkalan yaitu menunggu terbitnya surat keputusan pelepasan kawasan hutan (SK Biru) dari kementerian kehutanan atas persetujuan pelepasan kawasan yang ditempati oleh eks. pengungsi Sambas berdasarkan Kepmen Nomor 287 Tahun 2025 yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh kementerian ATR BPN. Oleh karena itu sudilah kiranya Bapak Wakil Presiden berkenan meluangkan waktunya guna membantu percepatan terbitnya SK Biru dimasud serta proses sertifikasi di Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN. sekiranya Bapak Wakil Presiden berkenan merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami relawan JPKP DPD Bangkalan serta 371 KK ( $\pm 1500$  warga pengungsi Sambas) kehadiran Bapak Wakil Presiden guna menyerahkan sertifikat yang selama 25 tahun ditempati pengungsi Sambas dan selama hamper 5 tahun relawan JPKP DPD Bangkalan perjuangkan.

Demikian permohonan serta harapan kami relawan JPKP DPD Bangkalan dan atas nama masyarakat pengungsi Sambas kami haturkan terima kasih sebesar besarnya seta semoga dapatnya Bapak Wakil Presiden berkenan.

*Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarakatuh.*

***Salam Pengabdian Tanpa Syarat JPKP Siap Melayani***

Bangkalan, 02 Oktober 2025



Tembusan Kepada :

1. DPP JPKP
2. Bupati Bangkalan
3. Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan
4. Arsip

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DOKUMEN 1**

### **Pengaduan**

**Warga Eks Pengungsi Sambas (Bangkalan Madura)**



Diajukan Oleh :

**JPKP DPD BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Raya Tanagura Barat Desa Tanagura Barat  
Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan  
HP. 087855974624



DEWAN PENGURUS ANAK CABANG (DPAC)  
JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN (JPKP)  
DESA KELBUNG KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR AHU-0001682.AH.01.07-TAHUN 2015

Sekertariat : Dsn. Longkak (Sambas) Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Nomor : 0001/DPAC-SPL/JPKP/XII/2021

Lampiran : 1 Bandel

Perihal : *Pengaduan Warga Eks Pengungsi Sambas (Bangkalan Madura)*

**KEPADA YTH :**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**BAPAK Ir. H. JOKO WIDODO**

**DI**

**JAKARTA**

***Salam Pengabdian Tanpa Syarat JPKP Siap Melayani***

*Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.*

Menindak lanjuti dari pengaduan warga eks pengungsi sambas sehubungan dengan lahan pekarangan yang mereka tempati, maka JPKP DPD Bangkalan mendatangi/blusukan ke pemukiman pengungsi Sambas bersama anggota JPKP DPC Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, DPAC Desa Kelbung Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, Unsur Muspika Kec. Sepulu dan perwakilan pengungsi Sambas (Anggota Team Terlampir) guna memperoleh kebenaran data sebanyak mungkin atas laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan kami buat dalam bentuk cerita dan fakta yang didalamnya kami cantumkan hasil investigasi kami dalam bentuk dokumentasi. Besar harapan kami, segenap relawan JPKP kepada Bapak Presiden berkenan mengabulkan permohonan perwakilan warga eks pengungsi Sambas untuk dapatnya lahan yang mereka tempati mendapatkan hak legalitas dari pemerintah pusat melalui mekanisme HIBAH. Demikian laporan kami atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

*Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.*

***Salam Pengabdian Tanpa Syarat JPKP Siap Melayani***

Bangkalan, 16 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua JPKP DPC Kec. Sepulu Bangkalan



**NURUL FARIZAH**

Ketua JPKP DPAC Desa Kelbung  
Kec. Sepulu Bangkalan,



**MOH. ALI HS**

Mengetahui,  
Ketua JPKP DPD Bangkalan



Mengetahui,  
Ketua DPP JPKP

MARET SAMUEL SUEKEN

*Tembusan Kepada Yth :*

1. *Menteri Dalam Negeri*
2. *Menteri ATR BPN*
3. *Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
4. *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)*
5. *Gubernur Jawa Timur*
6. *Bupati Bangkalan*
7. *Arsip*



***Salam Pengabdian Tanpa Syarat JPKP Siap Melayani***

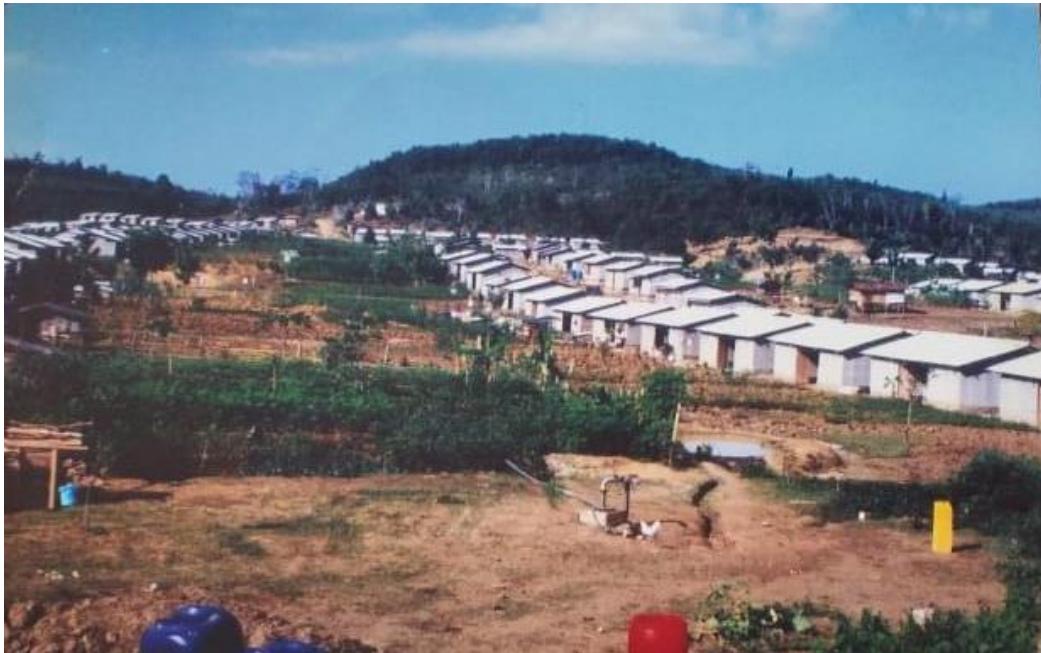
## **CERITA DAN FAKTA**

### **PENGUNGSI SAMBAS DI MADURA**

Kembali terbayang dalam benak kita, tarasa sakit dan pilu hati kita, ketika mendengar cerita warga eks pengungsi Sambas Dusun Longkak Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura. Dengan perasaan sedih yang mendalam atas kehilangan sebagian keluarga mereka yang dicintai, harta mereka pada peristiwa tragedi anak bangsa yang dikenal dengan peristiwa atau tragedi SAMBAS / SAMPIT KALIMANTAN BARAT. peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi antar anak bangsa dengan alasan apapun juga yang merenggut ratusan atau bahkan ribuan anak bangsa dari dua etnis yang berbeda.

Pemerintah pusat bergerak cepat waktu itu. Melalui kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, salah satu etnis pendatang hampir seluruhnya dipulangkan kedaerah asalnya MADURA dengan meninggalkan korban keluarga mereka tanpa bisa merawatnya secara wajar, dan juga meninggalkan harta benda yang selama bertahun tahun mereka kumpulkan. Bagi warga pengungsi yang masih punya keluarga dan tempat tinggal di daerah asalnya, mereka dikembalikan kekeluarga mereka masing masing. Tapi bagi pengungsi yang tidak punya tempat tinggal sekalipun masih punya kerabat keluarga, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang bekerja sama dengan Dinas Perhutani berinisiatif menempatkan mereka dibeberapa titik tanah / lahan yang dikuasai Dinas Perhutani dalam bentuk kavling ukuran (10 x 25 m<sup>2</sup>) yang terlebih dahulu diatasnya dibangun rumah darurat / sederhana untuk tempat mereka tinggal dengan ukuran bangunan (5 x 7 m<sup>2</sup>).





***Gb. Upaya Pemerintah Membangun Penampungan Untuk Pengungsi Sambas***



***Gb. Bangunan Asli Bantuan Pemerintah***

para pengungsi korban tragedi sambas tersebut berasal dari beberapa desa dan kecamatan yang berbeda di Kabupaten Bangkalan diantranya :

1. Desa Kelbung Kecamatan Sepulu
2. Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu
3. Desa Katol Timur Kecamatan Kokop
4. Desa Katol Barat Kecamatan Kokop
5. Desa Lembung Gunung Kecamatan Kokop
6. Desa Dupok Kecamatan Kokop
7. Desa Bandasoleh Kecamatan Kokop
8. Desa Genting Kecamatan Konang
9. Desa Batu Kaban Kecamatan Konang
10. Desa Durin Kecamatan Konang
11. Desa Dabung Kecamatan Geger
12. Desa Tlagah Kecamatan Galis

Yang kesemuanya terdata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan berjumlah 370 Kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa berkisar 1000 lebih. Dengan demikian lahan tanah perhutani yang ditempati pengungsi seluas  $370 \text{ KK} \times 250 \text{ m}^2 = 92.500 \text{ m}^2$ . Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana umum berupa lahan kosong untuk sarana ibadah yang kemudian dengan inisiatif warga pengungsi dengan dibantu oleh warga sekitar terlibat juga bantuan melalui Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil KH. ZUBAIR MUNTASOR dibangun sebuah masjid dan sekolah madrasah, juga tersedia prasarana lahan pemakaman / pekuburan,

akses jalan dan sebagainya yang kesemuanya lahan tanah perhutani terpakai seluas 19,7 ha, termasuk didalamnya lahan seluas 92.500 m<sup>2</sup> (kavling tanah yang ditempati warga pengungsi). Lahan tanah perhutani yang terpakai seluas ± 19, 7 ha tersebut dibatasi dengan pemasangan patok pembatas terdiri dari patok pembatas dari perhutani sendiri, dan patok pembatas yang dipasang oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bahkan area lahan tempat para eks pengungsi sambas tersebut sekarang bisa kita lihat jelas di google map sebagai area tersendiri dengan garis batas tersendiri pula. Sementara informasi yang didapat dari keterangan warga pengungsi Sambas bahwasannya tanah perhutani tersebut sudah ditukar guling dengan tanah TN didaerah Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur informasi tersebut berdasarkan keterangan dari oknum pegawai perhutani yang kerap kali meninjau lahan perhutani didaerah sekitar pengungsi Sambas.



**Gb. Pintu Gerbang Pemukiman Sambas**



**Gb. Wawancara Team Investigasi JPKP DPD Bangkalan dengan Perwakilan Pengungsi Sambas**



***Gb. Masjid Al Muhajirin Dusun Sambas Desa Kelbung***



***Gb. Sekolah / Madrasah Dusun Sambas Desa Kelbung***



***Gb. Akses Jalan di Pemukiman Warga Sambas***



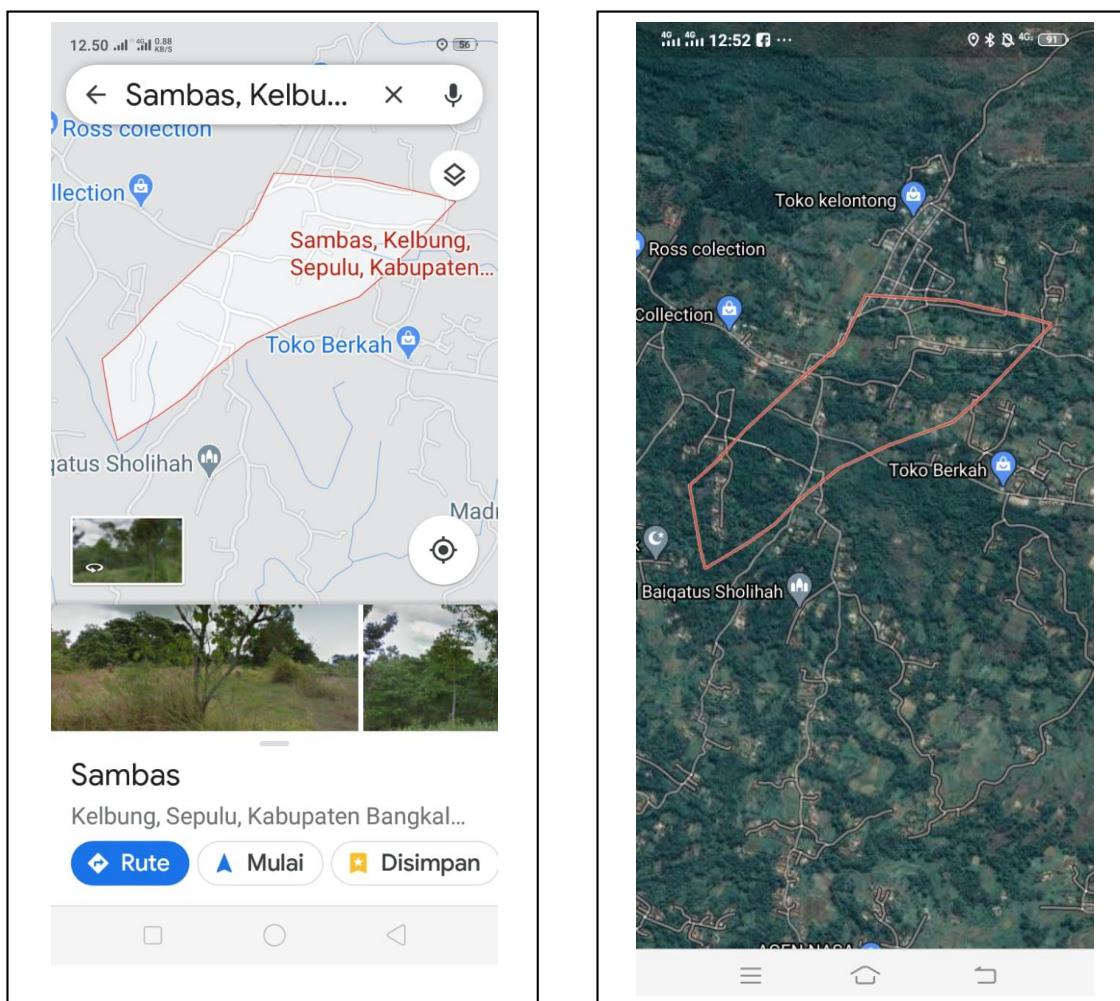
***Gb. Akses Pemakaman / Pekuburan di Pemukiman Warga Sambas***



***Gb. Patok Pembatas Pemukiman Warga Sambas***



**Gb. Tanda Yang dipasang pemerintah ditiap rumah Pengungsi Sambas**



**Gb. Peta Pemukiman Pengungsi Sambas  
(Sumber Google Maps)**

Pemerintah pusat melalui dinas terkait di tingkat propinsi melakukan pendampingan dan pembinaan sampai betul betul para pengungsi tersebut betah dan mandiri dipenampungan. Diantara pembinaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan penyuluhan keterampilan, sehingga mereka betul betul bisa mandiri.



***Gb. Bentuk Kerajinan Hasil Binaan Pemprof Propinsi***

Kini hampir 22 tahun berlalu para pengungsi sambas sudah berkembang menjadi sebuah perkampungan yang di desa tersebut yang lebih dikenal dengan Dusun Sambas. Mereka yang dengan bantuan pemerintah bahkan terkesan lebih maju bila dibandingkan dengan warga asli desa itu, para pengungsi tersebut sekarang bahkan sudah terdaftar sebagai warga Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mereka miliki dengan alamat tersebut diatas. Mereka juga berkali kali menggunakan hak pilih mereka sebagai pemilih diajang Pilkades desa setempat, Pilup, Pilkada, bahkan pilpres dengan alamat pemilih seperti tertera diatas. Bahkan pada ajang Pilpres 2019, mereka mendatangi posko relawan pemenangan Jokowi Amin untuk menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi Amin, dan Alhamdulillah hampir 90 % mereka terdata sebagai pemilih pasangan Jokowi Amin dengan menaruh harapan besar yang disampaikan kepada kami Tim Relawan pemenangan Jokowi Amin, agar bisanya ketika terpilih Pak Jokowi mau membantu mereka untuk memperoleh **Hak Legalitas** atas lahan tanah yang sudah hampir 22 tahun mereka tempati.

Adapun upaya yang pernah dilakukan warga eks pengungsi sambas dalam memperjuangkan keinginan atas hak legalitas tanah pemukiman yang mereka tempati sekarang antra lain :

1. Tiga (3) tahun pasca penempatan atau sekitar tahun 2003, mereka diminta oleh pihak Dinas Transmigrasi Jawa Timur untuk mengajukan permohonan melalui Dinas Transmigrasi Jawa Timur atas keinginan mereka mendapatkan hak legalitas atas tanah pemukiman warga eks pengungsi sambas ( Berkas tidak ditemukan)..
2. Dikarenakan belum juga ada kejelasan dari pihak Dinas Transmigrasi Jawa Timur atas pengajuan permohonan mereka, kembali sekitar tahun 2005 warga eks pengungsi sambas mengajukan permohonan yang sama dengan tujuan surat kepada pihak Dinas Transmigrasi Jawa Timur tembusan ke pihak Dinas Perhutani Jawa Timur dan pihak Bupati Bangkalan ( Berkas tidak ditemukan).
3. Terakhir pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 16 Mei 2014 mereka mengajukan proposal permohonan sertifikat yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan, dengan tembusan kepada pihak DPRD Bangkalan, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Timur (Berkas terlampir).

Semua upaya yang dilakukan warga eks pengungsi sambas tersebut semata hanya dengan tujuan agar dapatnya pemerintah pusat memberikan tanah pemukiman yang ditempati oleh mereka melalui mekanisme hibah dari Negara kepada warga eks pengungsi sambas.

Uraian dan gambaran sepintas tentang pengungsi sambas diatas betul betul hasil dari laporan yang disampaikan oleh perwakilan warga eks pengungsi sambas yang kemudian ditindak lanjuti dengan investigasi yang dilakukan team relawan JPKP DPD Bangkalan dengan secara langsung mendatangi lokasi pemukiman para pengungsi dan mewawancara beberapa warga serta mendokumentasikannya. Team relawan juga berkoordinasi dengan Kepala Desa kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan serta berkoordinasi juga dengan Muspika Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Besar harapan kami segenap pengurus JPKP, keluhan, laporan dan permohonan bantuan dari warga eks pengungsi sambas tersebut berkenan dikabulkan oleh Bapak Presiden.

Adapun permohonan para eks pengungsi sambas dengan alamat Dusun Longkak Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Jawa Timur tidak lain adalah agar dapatnya pemerintah pusat melalui kementerian terkait meng-**HIBAH**-kan lahan tanah seluas 92.500 m<sup>2</sup> yang ditempati para pengungsi sudah hampir 22 tahun ini, sehingga mereka mempunyai hak **legalitas** dan **kepastian hukum** yang tetap atas lahan tanah tersebut.

Demikian uraian kami atas pengaduan dari warga eks pengungsi sambas.

Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

***Salam Pengabdian Tanpa Syarat JPKP Siap Melayani***

Bangkalan, 16 Desember 2021

Ketua JPKP DPAC Desa Kelbung

Kec. Sepulu Bangkalan,



MOH. ALI HS



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN SEPULU  
KANTOR KEPALA DESA KELBUNG**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : / XII / 433.308.0 / 2020

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa KELBUNG Kecamatan sepulu Kabupaten Bangkalan menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pemukiman Pengungsi Sambas terletak di

1. Dusun : LONGKAK
2. Desa : KELBUNG
3. Kecamatan : SEPULU
4. Kabupaten : BANGKALAN

:

:

Demikian Surat keterangan ini buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Reg. 300 / XII / 433.308 / 2020



ABDUL HADI, SE, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 196804131996021002

Sepulu, 18 Desember 2020  
Kepala Desa Kelbung



MOHAMMAD ISNI

Nomor : 01/SP/VI/2014  
Lamp : 1 (Satu bendel)  
Hal : Permohonan Sertifikat Tanah

Bangkalan, 16 Mei 2014

Kepada

Yth : Bapak Bupati Kabupaten Bangkalan

Di : BANGKALAN

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat,

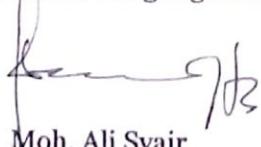
Dengan memanjangkan puji syukur kehadiran Allah, kami masyarakat asal pengungsi sambas yang ada di lokasi Resettlemen di desa kelbung kecamatan sepulu kabupaten bangkalan ingin memberitahukan sekaligus memohon kepada Bapak Bupati Bangkalan, bahwa sejak kami menempati lokasi resettlement pada awal tahun 2000 sampai saat ini tiada kejelasan tentang status tanah yang kami tempati, sehingga menimbulkan keraguan untuk membangun rumah yang permanen dan menimbulkan ketakutan setiap saat takut di gusur (di usir). Justru dari itu kami memohon dengan kerendahan hati kami kepada Bapak Bupati Bangkalan agar tanah yang kami tempati menjadi hak milik kami dengan adanya sertifikat dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan kami.

Adapun tanah yang kami tempati semuanya sebanyak 19,7 hektar dengan 370 KK dan setiap KK ukuran 10x25 m<sup>2</sup>, bersama ini kami lampirkan data-data KK warga yang menempati rumah di lokasi resettlemen.

Demikianlah pemberitahuan dan permohonan kami kepadas Bapak Bupati Bangkalan dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa mememberikan hidayah kepada Bapak Bupati Bangkalan, sehingga Bapak Bupati dapat membantu kesulitan kami amin. Atas kebijaksanaan serta bantuan Bapak Bupati Bangkalan Kami ucapkan terima kasih

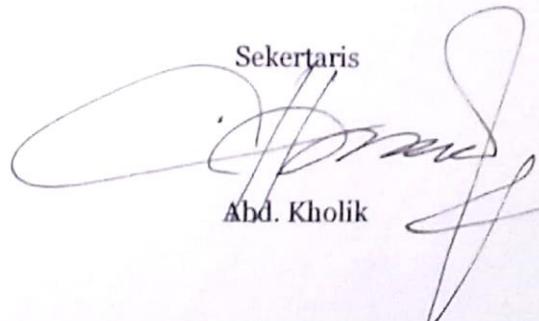
Sepulu, 16 Mei 2014-06

Koordinator Pengungsi Sambas



Moh. Ali Syair

Sekertaris



Abd. Kholik

Mengetahui

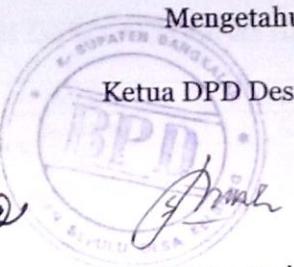
Camat Sepulu



Hadori, SE

NIP 19620607 (987)001

Ketua DPD Desa Kelbung



H. Imam Amirullah

Kepala Desa Kelbung



Aji Santoso

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua DPRD Bangkalan
2. Yth. Bapak Kepala DinSos Nakertrans



DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD)  
JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN DAN **PEMBANGUNAN** (JPKP)  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR AHU-0001682.AH.01.07-TAHUN 2015  
SK. DPD NO : 0691/SK/DPP-JKP/VII/2020

Sekertariat : Jl. Raya Tanagura Barat Desa Tangura Barat Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

**DAFTAR  
TEAM BLUSUKAN PENGUNGSI SAMBAS  
KELBUNG – SEPULU – BANGKALAN – JAWA TIMUR**

**KETUA TEAM : AHMAD SYAHINUDDIN (KETUA JPKP DPD BANGKALAN)**

**ANGGOTA : 1. MOH. AGIL GHUFRON (WAKET JPKP DPW JATIM EKS. KARESIDENAN MADURA)**

**2. MUSTOFA KAMAL FASYA (SEKRETARIS JPKP DPD BANGKALAN)**

**3. ABDUL WAHED (HUMAS JPKP DPD BANGKALAN)**

**4. MOH. MAHMUD (BENDAHARA JPKP DPD BANGKALAN)**

**5. SUNTIR (ANGGOTA JPKP DPD BANGKALAN)**

**6. MAHRUS ( BAGIAN ITE JPKP DPD BANGKALAN)**

**7. HJ. FAIZAH (KETUA JPKP DPC KEC. SEPULU - BANGKALAN)**

**7. ABDUL HADI, SE.MM. (CAMAT SEPULU)**

**8. MOH. ISNI (KEPALA DESA KELBUNG KEC. SEPULU)**

**9. MUNADI (BENDAHARA JPKP DPAC DESA KELBUNG KEC.**

**SEPULU - BKL**

**(PERWAKILAN WARGA PENGUNGSI SAMBAS)**

**10. MUHAMMAD ALI (KETUA JPKP DPAC DESA KELBUNG KEC. SEPULU -**

**BKL**

**(PERWAKILAN WARGA PENGUNGSI SAMBAS)**

**11. HAMIDAH (PERWAKILAN WARGA PENGUNGSI SAMBAS)**

**12. FATHUL KAMAL (PERWAKILAN WARGA PENGUNGSI SAMBAS)**

**13. ABD. MALIK ALI (PERWAKILAN WARGA PENGUNGSI SAMBAS)**

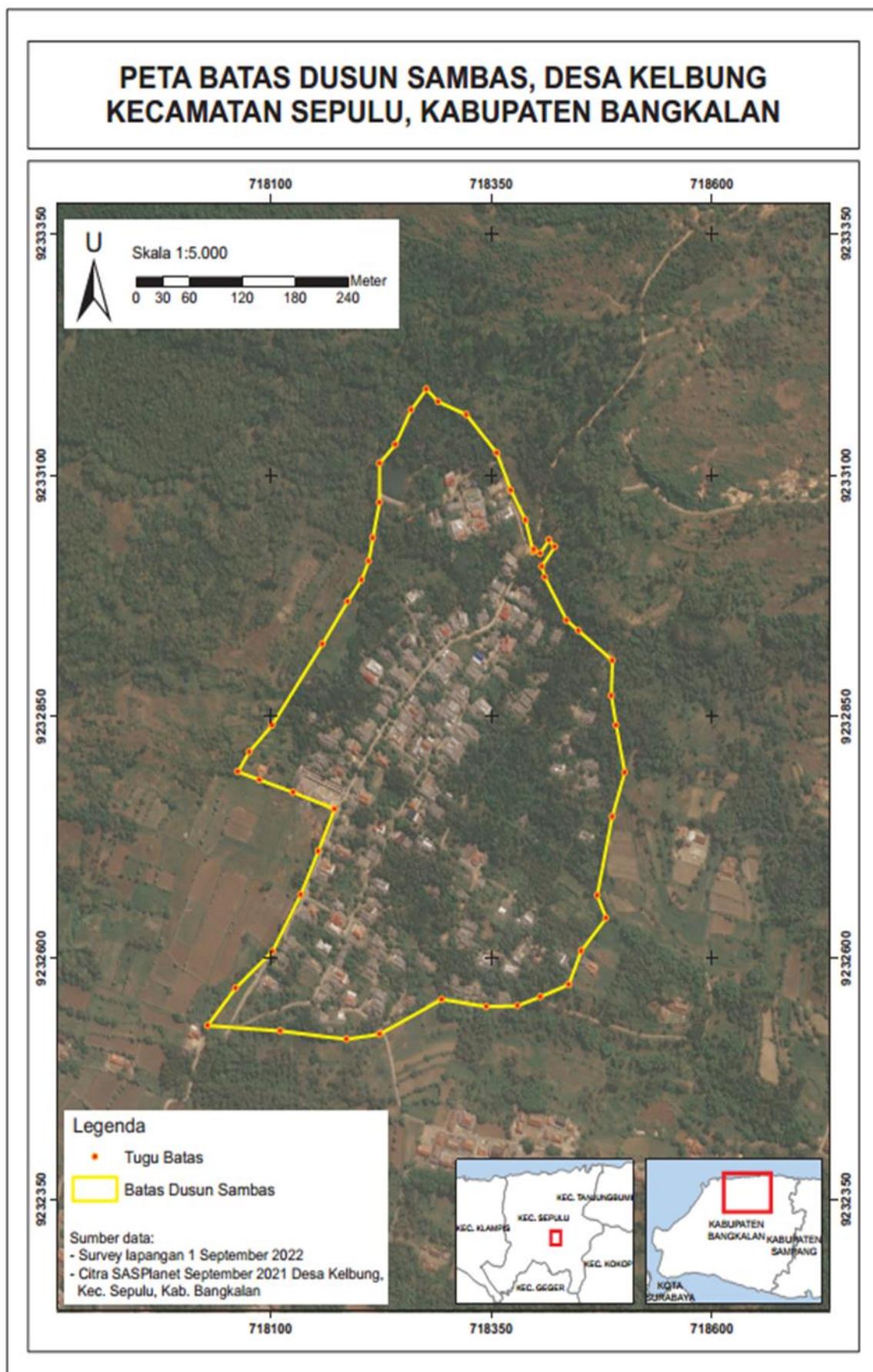
Bangkalan, 16 Desember 2021

Ketua DPD JPKP Bangkalan /  
Ketua Team Investigasi,



AHMAD SYAHINUDDIN

## DENAH LOKASI



## **DENAH LOKASI**



## **DOKUMEN 2**

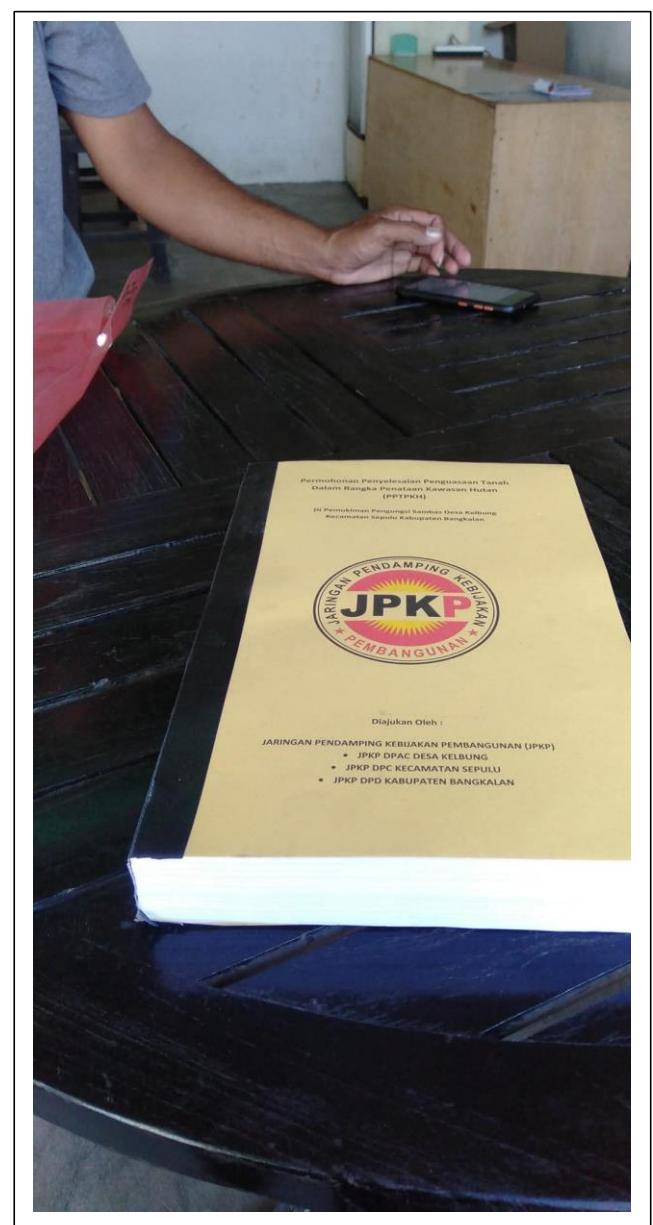


## **DOKUMEN 4**





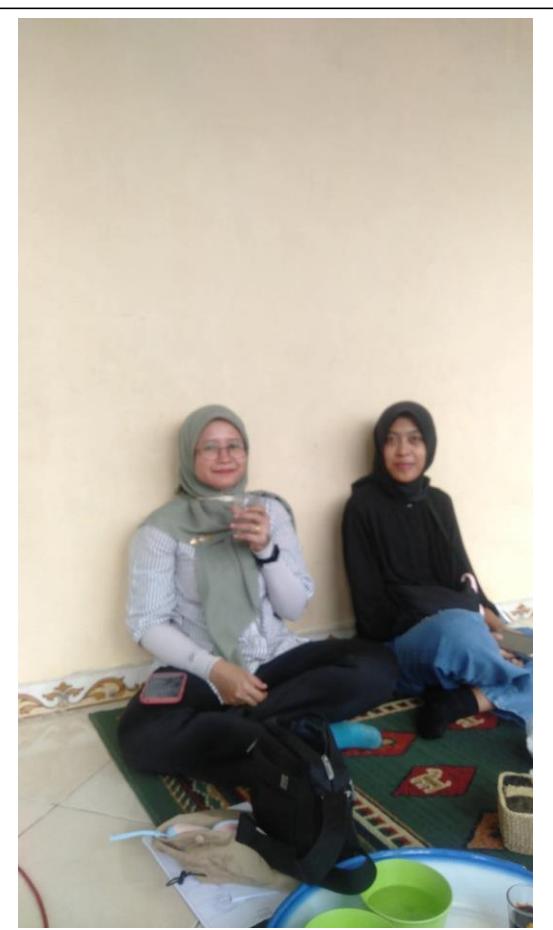
## **DOKUMEN 5**



## **DOKUMEN 6**



## DOKUMEN 7



## **DOKUMEN 8**



## **DOKUMEN 9**



# **DOKUMEN 10**

## **TELAAHAN STAF**

**Hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 287 Tahun 2025  
Tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Sumber  
Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)**

**I. Pokok Persoalan :**

1. Telah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 287 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Sumber Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur seluas ± 988.06 Ha

**II. Fakta-fakta yang berpengaruh :**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 287 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Sumber Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA):
  - a. Bahwa Menteri Kehutanan memberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Provinsi Jawa Timur Tahap II untuk Sumber Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) seluas ±988.06 Ha, dimana untuk Kabupaten Bangkalan seluas ± 19.91 Ha
  - b. Bahwa luas dan letak definitif kawasan hutan yang dilepaskan tersebut akan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan
  - c. Menteri Kehutanan memerintahkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta untuk melakukan Penataan Batas

Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dengan sumber APBN, APBD, dan sumber lain yang sah

2. Berdasarkan Pasal 50 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- Pembuatan Peta Trayek Batas
- Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif
- Pemetaan hasil penataan batas definitif
- Pembuatan dan penandatanganan BATB yang akan dilepaskan dan Peta Tata Batas
- Pelaporan kepada Menteri

### III. Pembahasan

- Berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Menteri Kehutanan memberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Kabupaten Bangkalan seluas ± 19.91 Ha dari permohonan PPTPKH di Kabupaten Bangkalan sebagai berikut: penggunaan kawasan hutan fungsi Hutan Lindung (HL) seluas ± 5 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 21 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas ± 48 Ha
- Data PPTPKH ini belum merupakan data final karena masih diperlukan tahapan pada proses selanjutnya yaitu Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta Tahun Anggaran 2026
- Hasil Koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendamping dari Pelaksanaan Tata Batas pada Tahun 2026, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Rapat Koordinasi dalam proses Penataan Batas Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Bangkalan
  - Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk tim teknis dari Kabupaten Bangkalan dan masyarakat terdampak



## **DOKUMEN 11**



